

**PERAN ALIANSI JURNALSTIK INDEPENDEN (AJI) PANGKALPINANG
SEBAGAI AGEN KRITIK DALAM MENDORONG *GOOD GOVERNANCE* DI
RUANG PUBLIK BANGKA BELITUNG**

Gusti Putra

Universitas Bangka Belitung
Email: gustistattlich@gmail.com

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.

Universitas Bangka Belitung
Email: iim_babel@yahoo.com

Dr. Novendra Hidayat, M.Si.

Universitas Bangka Belitung
Email: novendra@ubb.ac.id

Abstrak

Ruang publik, sebagaimana digagas oleh Habermas, merupakan ruang yang memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi secara aktif dalam membahas isu-isu publik. Keberadaan AJI sebagai organisasi independen dan agen kritik telah berperan dalam mentransformasi ruang publik tersebut, sehingga memungkinkan setiap individu secara bebas dan aktif terlibat dalam dikursus isu-isu publik. Penelitian ini menyajikan tentang peran Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Pangkalpinang sebagai agen kritik dalam mendorong *good governance* di ruang publik Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan peran AJI Pangkalpinang sebagai agen kritik dalam mendorong *good governance* di Bangka Belitung, dan menjelaskan hambatan dan dukungan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Pangkalpinang sebagai agen kritik dalam mendorong *good governance* di Bangka Belitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AJI Pangkalpinang mendorong *good governance* di ruang publik Bangka Belitung karena fungsi AJI Pangkalpinang dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memfasilitasi keterbukaan informasi publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui jurnalisme independen. Dalam melaksanakan perannya, AJI Pangkalpinang mengalami hambatan internal, hambatan eksternal, dan dukungan dari berbagai pihak yang mana mempengaruhi dampak AJI Pangkalpinang untuk *good governance* di Bangka Belitung.

Kata Kunci: AJI Pangkalpinang, Bangka Belitung, *Good governance*, Ruang Publik.

Abstract

According to Habermas, the public sphere is a forum where all citizens can actively engage in the discussion of public concerns. Every person can now openly and actively participate in the discussion of public issues thanks to the Indonesian Journalists Association's (AJI) presence as an independent organization and critical agency. According to this report, the Pangkalpinang Independent Journalists Alliance (AJI) plays a vital role in advancing good governance in the public domain of Bangka Belitung. This study employed a case study methodology and is qualitative in nature. This study describes the Alliance of Independent Journalists (AJI) Pangkalpinang's position as a crucial force in advancing good governance in Bangka Belitung, as well as the challenges and assistance that the organization has faced in this regard. The study's findings show that AJI Pangkalpinang supports good governance in the Bangka Belitung public sphere due to its role in keeping an eye on local government policies, encouraging government accountability and transparency, facilitating public information openness, and boosting public participation through independent journalism. In performing its duties, AJI Pangkalpinang encounters both external and internal challenges, as well as assistance from a range of stakeholders, all of which have an impact on the organization's ability to promote good governance in Bangka Belitung.

Keyword: *AJI Pangkalpinang, Bangka Belitung, Good governance, Public Sphere.*

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik atau yang sering diartikan dengan *good governance* merupakan pemerintahan pasca reformasi yang cenderung menjadi lebih efektif dan demokratis dengan menuntut praktik tata kelola yang lebih baik yang memberikan ruang dan peran bagi masyarakat. Salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah menciptakan citra pemerintahan yang demokratis di mana seluruh warga negara mempunyai kebebasan berekspresi (Hasriani, 2024). Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mencakup pengertian kepemimpinan, pengarahan, pengembangan administrasi publik, dan lain-lain, dan dapat juga diartikan pemerintahan. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan berkembang dan populer dengan sebutan *governance*, namun praktik terbaiknya kemudian disebut *good governance*.

Tentunya dalam mencapai *good governance*, diperlukan beragam mitra baik pendukung maupun kritik seperti pers. Sebagai mitra kritik, media pers berperan penting dalam mendorong produksi presentasi publik yang berkualitas guna meningkatkan kepuasan pengguna dan penerima, dan khususnya masyarakat secara keseluruhan terutama dalam mendorong *good governance*. Tata kelola yang baik merupakan ukuran praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai sarana pemberantasan kegiatan ilegal dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Artinya fokus dari kritik pers menitikberatkan pada kesejahteraan seluruh elemen masyarakat dan tercapainya keadilan sosial.

Lanjutan dari upaya kekuasaan pada era modern saat ini adalah yakni menciptakan ruang yang bias atas pengetahuan. Bias pengetahuan dalam politik yakni abnormalitas edukasi politik seperti memberikan pengetahuan palsu layaknya ilusi dalam sebuah kultur masyarakat (Fansuri, 2017). Kekuasaan dalam era kontemporer tidak lagi berbentuk struktur namun kekuasaan melebur sebagai satu kesatuan masyarakat. Artinya, di tubuh sosial masyarakat tidak ada yang murni, semuanya dibentuk oleh wacana-wacana kekuasaan melalui komunikasi politik pada ruang-ruang publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi, fasilitas umum dan lain-lainya (Ikhsan, 2023). Ruang publik seharusnya menjamin setiap informasi yang hadir haruslah bebas nilai dari upaya kekuasaan kepada penerima informasi publik seperti masyarakat (Sara, 2022). Pintu masuk untuk mengatasi privatisasi kekuasaan adalah memaksimalkan ruang publik secara virtual teks seperti media sosial maupun media pers (Purwanto, 2014). Terjaminnya ruang publik adalah awal mula untuk

mengaktualisasi konsep demokrasi deliberatif yang mendorong terciptanya kondisi warga atau masyarakat yang bebas dari naturalisasi politik.

Namun kembali lagi bahwa ruang publik melalui media sosial juga telah terkontaminasi oleh kelompok agensi kekuasaan seperti buzzer dan sebagainya (Robi'ah, 2020). Peran aktor intelektual yang menjadi penekan agar terciptanya informasi publik yang tidak bias nilai adalah seperti Aliansi Jurnalistik Independen atau disingkat AJI. Produksi media AJI berjenis informasi publik dengan sub-konten mulai dari sosial, ekonomi, politik, agama dan lainnya. Perlu diketahui bahwa AJI tidak terikat dengan Pemerintah, artinya tingkat bebas nilai pada setiap informasi masih terjamin. Media dan informasi yang diberikan oleh AJI adalah cerminan dari ruang-ruang yang disebutkan oleh Habermas sebagai ruang publik atau public sphere (Surokim, 2012). AJI Kota Pangkalpinang berupaya untuk menciptakan pemikiran ideal terutama pandangan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah Bangka Belitung yang lebih kritis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang dibentuk pada tahun 2019, walaupun secara definitif disahkan pada tahun 2021. Dulunya AJI Kota Pangkalpinang masih menginduk di AJI Palembang (Riadi, 2023). AJI dalam setiap programnya selalu menggunakan dana kolektif dan tidak menerima bantuan apapun. Begitupula proses perekrutan dianggap ketat dan harus memperhatikan integritas setiap jurnalis yang akan bergabung. Hal ini dilakukan agar AJI tetap terjaga dari berbagai intrik politik. Dikarenakan media khususnya pers saat ini mudah untuk dijadikan alat kepentingan Pemerintah bahkan kepentingan Politik. Terbentuknya AJI Pangkalpinang memberikan kontribusi yang besar guna memberikan jaminan atas hak seperti kebebasan menerima informasi tanpa adanya kontrol kekuasaan kepada khalayak luas. Sikap AJI yang bebas nilai dan kritis membatasi fungsi pers sebagai instrumen kontrol oleh pemerintahan terhadap masyarakat.

Sejak didirikannya, AJI Pangkalpinang telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. AJI Pangkalpinang sering bergabung dengan koalisi masyarakat sipil Bangka Belitung seperti dalam pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada pada tahun 2024. AJI Pangkalpinang juga rutin melakukan pelatihan cek fakta pada jurnalis agar informasi yang disebarkan sesuai dengan kebenaran yang ada. AJI Pangkalpinang sering mengadakan diskusi publik tentang berbagai isu bersama tokoh pemuda, akademisi, maupun masyarakat seperti diskusi publik tentang World Press Freedom Day 2025. Maupun melakukan launching tentang temuan mereka seperti temuan hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial pada

tahun 2024. AJI Pangkalpinang juga mengawasi berbagai kasus, terutama untuk melindungi hak jurnalis seperti pada kasus penghalangan tugas jurnalis oleh Kasat Lantas Polres Bangka Barat pada tahun 2025. AJI Pangkalpinang juga menyebarkan awareness pada saat Pemilu 2024 tentang potensi kecurangan agar masyarakat dapat kritis dalam memilih.

Penting untuk diketahui bahwa AJI harus menjadi jembatan komunikasi yang aktif dan obyektif antara pemerintah dan masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. AJI berperan penting dalam mengkritisi evolusi fungsi pemerintahan sejalan dengan aspirasi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. AJI Kota Pangkalpinang pada setiap pemberitaannya seperti memiliki kewajiban untuk mencerdaskan cara berpikir politik masyarakat. Cara berpikir politik yang dimaksud adalah tidak menerima informasi secara utuh, namun mereduksi kembali makna dibalik kepentingan wacana pemberitaan. Sebagaimana demikian disebut sebagai respon komunikasi politik warga negara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) selalu melakukan fungsi control terhadap penguasa seperti Pemerintah bahkan hingga para elit politik. Hingga demokrasi hanya akan terlaksana apabila terdapat lembaga yang mengontrol kekuasaan secara konsisten.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian pada metode kualitatif ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data untuk mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, dengan kata lain kualitatif (*qualitative approach*) merupakan suatu cara atau mekanisme kerja penelitian yang deskriptif dan menghimpun data hingga menafsirkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015: 52). Menurut Bailey (dalam Mukhtar, 2013: 11) penelitian deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena politik yang ditemukan, juga mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik terhadap suatu realitas yang terjadi, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu masyarakat beserta masalah yang terjadi di dalamnya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Bangka Belitung, khususnya melihat berbagai pola komunikasi politik yang dilakukan AJI dalam menyalurkan pendidikan dan edukasi berbasis pers. Alasan peneliti memilih AJI yang berlokasi di Kota Pangkalpinang yakni berdasarkan gambaran dari pemberitaan AJI yang secara spesifik menampilkan beragam edukasi sebagai bentuk komunikasi politik. Kemudian diperkuat dengan proses komunikasi politik melalui media pers yang bisa dicirikhaskan sebagai ruang publik atau public sphere. Peneliti melihat adanya kesesuaian antara objek dan lokasi yang diteliti dan pada akhirnya memilih Bangka Belitung sebagai lokus.

Target/Subjek Penelitian

Peneliti menentukan informan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mendapatkan data. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek informan adalah beberapa individu yang tergabung dalam kelompok AJI Kota Pangkalpinang sebanyak 3 orang, Tokoh Pemuda sebanyak 7 orang, dan masyarakat umum sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk informasi tambahan didapatkan dari literatur media cetak maupun online yang beredar.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan ketua dari AJI Kota Pangkalpinang dan diperkuat dengan beberapa informan penguat seperti tokoh pemuda dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang digunakan untuk memperkuat data primer yang didapatkan dari catatan, buku dan lain sebagainya. Menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen terkait data dokumen-dokumen penting, buku referensi, jurnal penelitian, skripsi dari penelitian terdahulu serta sumber internet dan koran yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui secara langsung data dari responden. Menurut Cristensen (dalam Sugiyono, 2016: 224), wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengajuan pertanyaan kepada yang informan atau pihak yang diwawancarai. Oleh sebab itu, wawancara menjadi hal terpenting dalam mengumpulkan karena hasil dari wawancara ini kemudian akan menampilkan data sesuai fakta yang dinyatakan dan didapatkan dari informan. Adapun wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan dilakukan secara langsung dengan informan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan perencanaan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2014: 75). Oleh karena itu, observasi biasanya dijadikan sebagai teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa dijadikan sebagai dokumen-dokumen sumber data dalam penelitian bisa berbentuk gambar, tulisan, karya-karya dan lain sebagainya (Sugiyono, 2016: 396). Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data visual dari foto-foto yang diambil pada saat observasi dan wawancara, buku dan referensi lain terkait penelitian serta data monografi Bangka Belitung dan berkas lainnya sebagai sumber data penunjang dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih dan memilah data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa wawancara, observasi serta dokumentasi untuk kemudian dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan. Peneliti kemudian

menyimpan dan memfokuskan data yang penting dan dapat mendukung penelitian mengenai pola komunikasi berdasarkan media pers oleh AJI Kota Pangkalpinang.

2. Display Data

Dalam display data akan lebih banyak ditampilkan data sistematis yang telah diolah dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang sudah didisplay dapat berupa tabel, matrik, grafik dan lain sebagainya untuk memepremudah peneliti dalam memahami data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang didapatkan dipilih berdasarkan hasil pengamatan dari lokasi penelitian melalui wawancara, dokumentasi fakta lapangan yang dianalisis menggunakan pendekatan *environmentalisme*. Kemudian data dan informasi yang telah dipilih dituangkan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel dan foto yang menggambarkan data agar relevan dengan fokus penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktivitas analisis dalam pengambilan keputusan atsa pertanyaan penelitian. Dalam tahap ini penarikan kesimpulan adalah hasil kesimpulan dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan pun kemudian digunakan untuk merangkum data secara tajam agar relevan dengan teori yang dipakai dan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji sehingga akhirnya peneliti mampu menjawab rumusan masalah mengenai peran AJI Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan demokrasi deliberatif berdasarkan edukasi dan pendidikan politik melalui komunikasi politik media pers.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Pangkalpinang Sebagai Agen Kritik dalam Mendorong *Good governance* di Bangka Belitung

Di Bangka Belitung, AJI tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra kritis dalam proses pembangunan daerah. Dengan menyuarakan kepentingan publik melalui produk jurnalistik yang bermutu, AJI turut mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. AJI juga sering terlibat dalam diskusi publik, pelatihan jurnanisme warga, dan advokasi terhadap kebebasan pers, yang semuanya bertujuan membentuk ekosistem informasi yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, peran AJI sangat krusial dalam memperkuat nilai-nilai *good governance* di Bangka Belitung, terutama melalui upaya penciptaan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi.

1. Fungsi AJI Pangkalpinang sebagai Pengawas Kebijakan Pemerintah Daerah

AJI Pangkalpinang secara aktif mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan aktifnya AJI Pangkalpinang dalam mengawasi kebijakan di berbagai bidang seperti pada pendidikan, keuangan, dan kebebasan pers, AJI Pangkalpinang memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengkritisi dan menilai rasionalitas serta legitimasi kebijakan pemerintah. Sebagaimana digambarkan dalam teori Habermas bahwa ruang publik yang sehat memerlukan aktor-aktor yang bisa menerjemahkan kepentingan masyarakat menjadi diskursus yang bisa didengar dan direspons oleh negara. Dengan mengawasi berbagai kebijakan pemerintah daerah, AJI Pangkalpinang menjaga agar proses demokrasi tidak dimonopoli oleh kepentingan kekuasaan sekaligus berkontribusi pada terciptanya *good governance* yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan daerah, AJI Pangkalpinang berperan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Bangka Belitung dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah. AJI Pangkalpinang mengawasi berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat dan kehadirannya membantu memastikan agar kekuasaan tidak dijalankan secara sepihak. Pengawasan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan elemen kunci dari *good governance*.

Meskipun AJI Pangkalpinang sudah menyediakan informasi dan berusaha mengangkat isu, ruang publik yang terbentuk belum sepenuhnya efektif karena komunikasi yang jarang dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan kurang optimal. Ketika informasi tidak tersebar luas atau tidak terakses oleh masyarakat, maka ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan dan kritik terhadap kekuasaan gagal terwujud secara efektif.

Penerapan prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam ‘Fungsi AJI Pangkalpinang sebagai Pengawas Kebijakan Pemerintah Daerah’ dapat dianalisis secara seksama. Dari segi akuntabilitas, AJI Pangkalpinang berperan penting sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah Bangka Belitung, seperti melakukan investigasi terhadap isu-isu strategis seperti pendidikan, keuangan, pertanian, pertambangan, dan korupsi yang mendorong

pejabat daerah untuk bertanggung jawab dan lebih berhati-hati dalam pembuatan keputusan, meskipun masih terjadi resistensi pemerintah yang menutup kritik dengan cara halus dan ancaman ekonomis. Dalam aspek transparansi, AJI Pangkalpinang berusaha membuka akses informasi melalui peliputan dan peluncuran temuan kebijakan pemerintah daerah. Namun, AJI Pangkalpinang menghadapi tantangan seperti akses informasi yang tertutup. Saat informasi yang diberikan AJI Pangkalpinang sampai ke masyarakat, ada masyarakat yang mengapresiasi informasi dari AJI Pangkalpinang karena dianggap lebih jujur dan tidak memihak, tetapi masih ada juga masyarakat yang awam atau kurang mengenal keberadaan AJI Pangkalpinang secara luas, yang menunjukkan transparansi informasi belum optimal menjangkau seluruh lapisan publik. Untuk aspek partisipasi, keberadaan AJI Pangkalpinang memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif mengawasi pemerintah, mendapat informasi, dan memahami kebijakan yang dikeluarkan sehingga potensi partisipasi publik di Bangka Belitung meningkat. Namun, masih minimnya pengetahuan terhadap keberadaan AJI Pangkalpinang dan keterbatasan akses informasi mengindikasikan bahwa mekanisme partisipasi belum meluas secara efektif.

2. AJI Pangkalpinang dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Jurnalisme yang dijalankan oleh anggota AJI turut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran publik, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. AJI Pangkalpinang juga aktif menggunakan mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mengakses dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban pemerintah. AJI Pangkalpinang bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui pemberitaan yang objektif dan kritis. Dengan memastikan bahwa liputan jurnalistik didasarkan pada sumber yang beragam dan kredibel, AJI Pangkalpinang memperkuat mekanisme pengawasan sosial yang menjadi fondasi akuntabilitas pemerintahan. Ini mendorong terciptanya *good governance* yang transparan dan bertanggung jawab, di mana kebijakan publik tidak hanya dibuat secara legal formal, tetapi juga mendapat legitimasi melalui proses komunikasi publik yang demokratis dan terbuka.

Penerapan prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam ‘AJI Pangkalpinang dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan’ dapat dianalisis secara seksama. Dari sisi akuntabilitas, AJI Pangkalpinang aktif melakukan pengawasan terhadap anggaran legislatif dan kebijakan pemerintah daerah dengan pemantauan serta pemberitaan jika ada kebijakan yang tidak sesuai aturan atau merugikan masyarakat. Namun, efektivitas akuntabilitas AJI Pangkalpinang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam soal vokalitas terhadap isu-isu sensitif. Dalam sisi transparansi, AJI Pangkalpinang melakukan peliputan yang berusaha mengungkap kebijakan pemerintah yang cenderung tertutup, dengan mewawancarai berbagai narasumber yang kompeten agar informasi yang disebarkan akurat dan berimbang. Kendati demikian, hambatan dalam transparansi tetap muncul dari kedekatan media lain dengan elit dan akses informasi yang masih terbatas, yang menjadi perhatian AJI Pangkalpinang agar bisa membuka fakta secara lebih maksimal. Dalam aspek partisipasi, dapat dilihat dari peran AJI Pangkalpinang membangun sinergi antara pers, masyarakat sipil, dan pemerintah. AJI Pangkalpinang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah dapat meningkat. Namun, AJI Pangkalpinang perlu lebih vokal dan berani membuka isu sensitif sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Peran AJI Pangkalpinang dalam Memfasilitasi Keterbukaan Informasi Publik

AJI Pangkalpinang membantu memperkuat kemampuan jurnalis dalam mengakses dan menyebarkan informasi publik secara akurat dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. AJI Pangkalpinang juga turut mendukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui keterbukaan informasi. Dengan keberadaan AJI Pangkalpinang, proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di daerah ini menjadi lebih efektif karena jurnalis yang tergabung dapat memberikan pengawasan independen terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang wajib diperoleh publik, AJI Pangkalpinang berusaha memberikan liputan yang transparan dengan tidak berpihak kepada pemerintah dan

lembaga-lembaga terkait. AJI Pangkalpinang secara prinsip tidak menjalin kerja sama jurnalistik dengan lembaga yang berplat merah seperti pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan lembaga yang merusak lingkungan. Pengecualian hanya diberikan pada kerja sama di bidang kemanusiaan bersama lembaga seperti BPJS dan PMI. AJI Pangkalpinang juga membuka kerja sama dengan institusi internasional seperti Kedutaan Besar Australia, Google, UNESCO, dan UNICEF yang memberikan kebebasan penuh dalam penulisan berita.

Penerapan prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam ‘Peran AJI Pangkalpinang dalam Memfasilitasi Keterbukaan Informasi Publik’ dapat dianalisis secara seksama. Dalam sisi akuntabilitas, AJI Pangkalpinang memegang peranan penting dengan melakukan peliputan investigasi terhadap kebijakan pemerintah, aparat penegak hukum, dan legislatif, serta mengkritisi kebijakan yang kurang transparan agar pejabat lebih bertanggung jawab. Namun, kurangnya intensitas dalam mengungkapkan isu-isu sensitif menjadi catatan penting yang mengindikasikan belum maksimalnya peran mereka dalam mendorong akuntabilitas penuh. Dari sisi transparansi, AJI Pangkalpinang berusaha menyediakan informasi yang tidak dapat diakses masyarakat secara langsung, mengupayakan pemberitaan yang jujur dan apa adanya, serta menjaga independensi dengan tidak bekerjasama dengan institusi pemerintah atau BUMN kecuali yang sifatnya kemanusiaan, seperti BPJS dan PMI. Edukasi yang dilakukan AJI kepada jurnalis dan masyarakat juga bertujuan meningkatkan kualitas informasi sehingga publik memperoleh informasi yang benar dan bukan hoaks. Namun, ketidakterbukaan pemerintah dan resiko yang diterima AJI Pangkalpinang untuk menggali informasi secara mendalam sehingga dapat disampaikan ke masyarakat masih terbatas dan kurang agresif di beberapa isu. Mengenai partisipasi, AJI Pangkalpinang aktif melibatkan jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan agar terjadi peningkatan literasi media dan pemahaman kritis terhadap berita. Keberadaan mereka di media sosial serta pembahasan isu-isu jarang tersentuh menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

4. Kontribusi AJI Pangkalpinang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Jurnalisme Independen

Melalui berbagai program pelatihan, diskusi publik, dan kolaborasi dengan komunitas lokal, AJI Pangkalpinang mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan di wilayah Bangka Belitung. Berbagai kegiatan yang diadakan AJI Pangkalpinang membantu membuka ruang dialog yang penting bagi masyarakat untuk memahami peran pers dalam era digital serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebebasan pers di tingkat lokal hingga nasional. AJI Pangkalpinang berupaya untuk memberikan informasi yang benar dan membekali masyarakat dengan kemampuan kritis dalam menghadapi arus informasi, terutama di era media sosial yang rawan hoaks. AJI Pangkalpinang juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan informasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan AJI Pangkalpinang, yakni mengundang organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga pecinta lingkungan untuk berdiskusi adalah bentuk nyata dari penciptaan ruang publik sebagai tempat di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional dan bebas mengenai masalah bersama.

Penerapan prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam ‘Kontribusi AJI Pangkalpinang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Jurnalisme Independen’ dapat dianalisis secara seksama. Dari sisi akuntabilitas, melalui edukasi dan pemberitaan yang berimbang, AJI Pangkalpinang berkontribusi dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif, mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil. AJI Pangkalpinang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun pemahaman hukum dan etika bermedia di kalangan masyarakat. Di dalam aspek transparansi, ada tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang aktif di media sosial. Meski begitu, AJI Pangkalpinang tampak berupaya menyampaikan fakta apa adanya dan berkomitmen terhadap transparansi informasi kepada publik. Dalam hal partisipasi, AJI Pangkalpinang aktif mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, FGD, kampanye, dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang valid serta melawan hoaks. Tetapi terdapat kesenjangan partisipasi, di mana masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan kehadiran AJI Pangkalpinang secara langsung. Yang mana menunjukkan bahwa partisipasi belum

merata ke semua lapisan, dan pendekatan AJI Pangkalpinang masih cenderung menyentuh kelompok tertentu yang lebih terakses (misalnya yang aktif di media sosial atau forum diskusi formal), sehingga ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan.

B. Hambatan dan Dukungan Aliansi Journalistik Independen (AJI) Sebagai Agen Kritik dalam Mendorong *Good governance* di Bangka Belitung

Dalam menjalankan perannya sebagai agen kritik untuk mendorong *good governance* di Kota Pangkalpinang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Hambatan tersebut antara lain berupa tekanan politik, intimidasi terhadap jurnalis, serta akses informasi publik yang masih terbatas. Meskipun demikian, AJI Kota Pangkalpinang juga mendapatkan dukungan yang signifikan dalam menjalankan perannya. Dukungan ini penting untuk memperkuat posisi AJI dalam menuntut akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Pangkalpinang.

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Peran AJI

a. Hambatan Internal AJI Pangkalpinang

Berbagai hambatan internal tentu terjadi dalam pelaksanaan peran AJI Pangkalpinang. Hambatan internal dalam organisasi AJI Pangkalpinang sering kali bersumber dari dinamika organisasi dan keterbatasan sumber daya. AJI Pangkalpinang memiliki anggota 40 orang dari berbagai daerah di Bangka Belitung, dengan perbedaan latar belakang dari setiap anggota AJI Pangkalpinang tentu pendapat yang dimiliki setiap individu juga berbeda. Hal ini membuat perbedaan pendapat dalam forum sering terjadi dalam organisasi AJI Pangkalpinang. Perbedaan jadwal juga menjadi salah satu hambatan AJI Pangkalpinang karena kerap menjadi penghalang untuk melibatkan semua anggota secara bersamaan, sehingga tidak semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan atau diskusi penting.

Di sisi lain, hambatan internal yang juga tidak bisa AJI Pangkalpinang hindari adalah persoalan dana. Saat ini, AJI Pangkalpinang masih bergantung pada iuran anggota yang dikumpulkan setiap bulan dari anggaran pribadi. Yang mana sumber dana ini cenderung tidak stabil dan terbatas, sehingga membatasi kapasitas organisasi dalam menjalankan kegiatan secara optimal. Selain iuran

anggota, AJI Pangkalpinang juga menerima dukungan dana dari beberapa NGO, seperti Google, kedutaan besar (kedubes), dan organisasi independen lainnya. Bantuan ini tentu membantu AJI Pangkalpinang dalam mengisi sebagian kekosongan dana internal. Tetapi bantuan dana seperti ini tidak stabil dan belum sepenuhnya mengatasi masalah pendanaan yang dibutuhkan AJI Pangkalpinang agar dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

b. Hambatan Eksternal dari Lingkungan Pemerintahan dan Sosial

AJI Pangkalpinang menghadapi berbagai hambatan eksternal yang bersumber dari lingkungan pemerintahan. Hambatan eksternal yang harus AJI Pangkalpinang hadapi terutama terkait dengan keterbatasan akses informasi publik dan tekanan terhadap kebebasan pers. Pemerintah daerah kerap kali tidak transparan dalam menyampaikan data dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, menyulitkan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal. Pejabat pemerintah dan aparat hukum yang tidak memahami atau sengaja menghambat keterbukaan informasi akan membuat dialog publik menjadi timpang dan pemerintahan kehilangan akuntabilitas. Tidak hanya ketidakterbukaan informasi dari pemerintah daerah yang menjadi hambatan eksternal AJI Pangkalpinang untuk melakukan perannya secara maksimal. Pemerintah daerah juga tertutup dan tidak menerima kritik atau laporan yang AJI Pangkalpinang ajukan.

Selain itu, intervensi halus hingga tekanan langsung terhadap anggota AJI Pangkalpinang masih sering terjadi, baik melalui ancaman ekonomi, hukum, pembatasan liputan, maupun ancaman lainnya yang mengancam independensi jurnalis dan media lokal. Ancaman berupa embargo ekonomi, penurunan pemberitaan, penghalangan peliputan, penghapusan data, serta ancaman pidana menunjukkan adanya distorsi ruang publik yang seharusnya terbuka dan egaliter. Tindakan represif seperti ini tidak hanya mengekang kebebasan pers, tetapi juga membatasi fungsi kontrol sosial media yang sangat penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang baik. Terjadinya ancaman pidana dan tekanan terhadap AJI Pangkalpinang yang tidak hanya merusak prinsip rule of law, tetapi juga menciptakan ketakutan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pemerintah.

2. Dukungan yang Diterima dalam Pelaksanaan Peran AJI Pangkalpinang

AJI Pangkalpinang mendapatkan berbagai dukungan dalam melaksanakan perannya sebagai garda terdepan kebebasan pers. Dukungan tersebut datang dari mitra lokal maupun nasional. Bentuk dukungan yang diberikan juga bermacam-macam, seperti bantuan teknis, pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis, hingga pendanaan untuk kegiatan advokasi kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap jurnalis. Kehadiran dukungan ini sangat membantu AJI Pangkalpinang dalam menjalankan program-programnya. Kerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media lain tak hanya memperkuat posisi AJI Pangkalpinang, melainkan juga menciptakan dampak yang lebih luas bagi kebebasan pers dan demokrasi lokal. Selain itu, AJI Pangkalpinang tentu juga mendapatkan dukungan dari AJI Nasional. AJI Nasional yang membantu AJI Pangkalpinang dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di pusat, yang mana ini bukan sekadar bentuk dukungan struktural, tetapi bagian dari proses pembukaan ruang diskusi lintas level, yaitu dari lokal ke nasional.

AJI Pangkalpinang juga mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga internasional seperti kedutaan besar, Google, UNESCO, UNICEF, dan lain-lain. Kerja sama AJI Pangkalpinang ini memperluas jaringan komunikasi ke ranah internasional, memperkuat ruang publik lokal melalui akses sumber daya dan dukungan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers. Melalui kerjasama ini, AJI Pangkalpinang tentu memperoleh akses untuk terlibat dalam forum internasional, pertukaran pengetahuan, dan mendapatkan insight praktik-praktik terbaik dalam perlindungan kebebasan pers.

C. ANALISIS TEORI

Keberadaan pers menjadi ruang bagi publik dalam memperoleh maupun menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Pers berperan menjadi pengawas bagi terlaksanya kehidupan masyarakat yang baik dan sesuai untuk kesejahteraan masyarakat. Pers sebagai lembaga publik harus berperan aktif dalam membangun ruang publik yang sehat. Saluran untuk menyampaikan aspirasi dan politik harus dibuka seluas-luasnya agar ruang publik benar-benar menjadi tempat di mana berbagai ide dari masyarakat dapat muncul, bertemu, dan berdialog secara terbuka.

Pers mendorong masyarakat agar dapat terlibat dalam semua urusan publik, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dibuat melalui proses demokrasi deliberatif. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan tujuan pers

sebagai instrumen pokok di masyarakat. Peran jurnalisme publik dalam pelaksanaan demokrasi deliberatif adalah membangun partisipasi politik yang berkelanjutan. Dari sini dapat dilihat bahwa peran pers sebagai fourth estate tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi dibantu kekuatan besar dari masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara deliberatif diuji di hadapan publik. Sehingga pemerintah tidak mengandalkan kekuasaan politik semata untuk menetapkan kebijakan, melainkan mempertimbangkan penerimaan dan persetujuan publik. Semakin sering suatu kebijakan mendapatkan masukan dan pengujian dari masyarakat, semakin besar legitimasi yang dimilikinya. Dengan demikian, legitimasi kebijakan bukan ditentukan oleh hasil akhir komunikasi politik, melainkan oleh bagaimana prosesnya dijalankan secara partisipatif dan transparan.

Di sinilah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) hadir sebagai organisasi profesi jurnalis independen memainkan peran penting dalam membentuk, menjaga, dan memperluas ruang publik. AJI hingga saat ini masih berupaya tetap menjaga diri dari berbagai intrik politik dan mempertahankan keindependennya. Apalagi saat ini, media khususnya pers mudah untuk dijadikan alat kepentingan Pemerintah bahkan kepentingan Politik. AJI memberikan kontribusi yang besar guna memberikan jaminan atas hak seperti kebebasan menerima informasi tanpa adanya kontrol kekuasaan kepada khalayak luas. Sikap AJI yang bebas nilai dan kritis membatasi fungsi pers sebagai instrumen kontrol oleh pemerintahan terhadap masyarakat.

AJI Pangkalpinang berupaya mewujudkan ruang publik di mana masyarakat dapat berdiskusi, melakukan kritik dan menyampaikan pendapatnya tanpa intervensi dari pemerintah atau pihak mana pun. Ruang publik yang menjadi tempat yang bisa diakses oleh semua orang, bersifat terbuka, dan inklusif. Dalam pandangan Habermas, jurnalisme publik ini berupaya untuk mengembalikan fungsi pers sebagai ruang publik kritis sebagaimana yang dilakukan saat kemunculannya. Pers harus dibentuk sebagai media perjuangan, media penyampaian aspirasi, ekspresi, dan opini publik, serta harus menjadi pembela pada kepentingan emansipatoris.

Dalam pelaksanaan perannya, ada beberapa pertimbangan mengapa AJI Kota Pangkalpinang menjadi titik strategis untuk mendorong *good governance* di Bangka Belitung. Pertama, AJI Pangkalpinang berperan sebagai pengawas publik di mana AJI Pangkalpinang mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan publik di Bangka Belitung agar transparan dan akuntabel. Kedua, AJI Pangkalpinang memiliki kemampuan

dalam mengakses informasi publik dengan luas dan dapat menyebarkan informasi tersebut secara cepat dan luas ke masyarakat Bangka Belitung. Ketiga, AJI Pangkalpinang berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pemberitaan dan investigasi yang mereka lakukan sehingga membantu membuka kebijakan dan keputusan pemerintah agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, AJI Pangkalpinang berperan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung sehingga AJI Pangkalpinang berfungsi sebagai mediator yang menyampaikan aspirasi dan kritik masyarakat kepada pemerintah serta menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik. Kelima, AJI Pangkalpinang berperan dalam memperkuat partisipasi publik dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keenam, AJI Pangkalpinang berperan dalam menjaga independensi media yang mana sebagai organisasi jurnalis independen, AJI Pangkalpinang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.

Berdasarkan titik strategis tersebut, AJI Kota Pangkalpinang memiliki dampak dan kemampuan untuk mewujudkan ruang publik yang ideal menurut Jürgen Habermas. Tetapi untuk mencapai ruang publik yang ideal tersebut, diperlukan perjuangan dan kontribusi banyak pihak seperti partisipasi luas dari masyarakat dan pemerintah. Jadi, meskipun AJI Pangkalpinang telah membangun pondasi untuk mencapai *good governance* di Bangka Belitung, realitas kebebasan pers baik di ranah lokal maupun nasional masih menghadapi kendala eksternal seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan tekanan-tekanan dari pemerintah atau pihak penguasa lainnya. Sehingga ruang publik yang ideal secara menyeluruh masih dalam proses perbaikan dan perlu diperjuangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai “Peran Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Pangkalpinang sebagai Agen Kritik dalam Mendorong *Good governance* di Ruang Publik Bangka Belitung” yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa AJI Pangkalpinang memiliki peran yang signifikan dalam mendorong *good governance* di ruang publik Bangka Belitung. AJI Pangkalpinang berfungsi sebagai pengawas kebijakan daerah di Bangka Belitung dengan

melakukan investigasi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bangka Belitung seperti dalam bidang pertanian, pertambangan, bahkan kasus korupsi. AJI Pangkalpinang juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Bangka Belitung dengan melakukan pengawasan pada badan legislatif dan melakukan liputan pada kebijakan daerah yang dilakukan secara tertutup dan kurang transparan seperti persoalan anggaran pendidikan, anggaran BPJS, dan lain-lain. AJI Pangkalpinang juga berperan dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik dengan melakukan peliputan pada pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan badan legislatif lalu menyebarkannya dengan apa adanya. AJI Pangkalpinang juga tidak bekerjasama dengan plat merah untuk menjaga keindependennannya. AJI Pangkalpinang juga berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan rutin mengadakan berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat seperti seminar, pertemuan, FGD, campaign, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan peran AJI Pangkalpinang untuk mendorong *good governance* di ruang publik Bangka Belitung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip *good governance* tersebut. AJI Pangkalpinang memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dialami AJI Pangkalpinang adalah perbedaan pemahaman dan pendanaan. Perbedaan pemahaman yang terjadi dalam internal AJI Pangkalpinang dapat dengan mudah diselesaikan dalam forum dan keprofesionalitasan anggota AJI Pangkalpinang agar perbedaan pemahaman yang terjadi tidak berdampak kepada visi misi AJI Pangkalpinang. Di lain sisi, pendanaan menjadi sumber penghambat utama karena pasti dibutuhkan dana dalam melakukan peliputan. Hambatan eksternal yang dialami AJI Pangkalpinang adalah adanya ancaman ekonomi yang sering diterima oleh anggota AJI Pangkalpinang seperti pemutusan kontrak dan hubungan kerja. Saat melakukan peliputan, anggota AJI Pangkalpinang juga sering mengalami penghalangan peliputan, penghapusan data hasil liputan, hingga penurunan berita. Anggota AJI Pangkalpinang juga pernah dilaporkan balik dan ancaman-ancaman pidana lainnya. Selain faktor penghambat, AJI Pangkalpinang juga memiliki faktor pendukung seperti dukungan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media lainnya dalam melaksanakan berbagai aktivitas. AJI Pangkalpinang juga bekerjasama dengan LPSK, Ombudsman, KIP, KID, PMI, dan BPJS dalam hal jurnalistik. Selain itu, AJI Pangkalpinang juga bekerjasama dengan pemerintahan di luar negeri seperti kedubes, Google, UNESCO, UNICEF dalam jurnalistik, berbagai kegiatan lainnya, dan bantuan

dana. AJI Pangkalpinang juga dibantu AJI Nasional, terutama untuk berkomunikasi dengan pusat dan agar isu-isu di Bangka Belitung bisa diangkat ke tingkat nasional.

Meskipun begitu, ada berbagai aspek yang perlu ditingkatkan bagi AJI Pangkalpinang. Seperti perlunya meningkatkan frekuensi dan intensitas komunikasi agar informasi yang diberikan dapat tersebar secara merata ke berbagai kalangan dan daerah di Bangka Belitung. AJI Pangkalpinang juga perlu mengoptimalkan peran sebagai agen kritik terutama untuk isu-isu sensitif dan menyebarkannya dengan transparan ke publik. AJI Pangkalpinang juga perlu meningkatkan untuk menjangkau masyarakat terutama masyarakat yang masih terbatas dalam menggunakan teknologi. Hal ini berguna untuk memperbaiki dan memperjuangkan tercapainya ruang publik yang ideal.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran dari peneliti adalah agar AJI Pangkalpinang terus menguatkan peran sebagai pengawas independen yang kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah Bangka Belitung, sehingga membantu memastikan informasi yang diterima publik tersampaikan secara terbuka dan akurat saat sampai ke tangan masyarakat. AJI Pangkalpinang juga perlu memperkuat kemampuan serta menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak tetapi juga menjaga keindependensi nya guna mendorong terciptanya budaya transparansi informasi dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif. Perlu digarisbawahi bahwa peran AJI Pangkalpinang bukan hanya untuk melaporkan, tetapi juga mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. Dialog yang terbuka dan jujur ini merupakan pilar penting agar terwujudnya *good governance* di ruang publik Bangka Belitung. Dengan memperkuat kemampuan, mempererat kerjasama, dan melakukan advokasi, AJI Pangkalpinang dapat menjadi pemicu perubahan demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel di ruang publik Bangka Belitung.

TENTANG PENULIS

Nama penulis adalah Gusti Putra, seorang mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Bangka Belitung. Penulis lahir di Pangkalpinang, 16 Agustus 2001. Penulis dapat dihubungi lewat alamat email gustistattlich@gmail.com berikut. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi semasa di Univertas Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fansuri, H. (2017). Konsumerisme dan hegemoni Barat terhadap masyarakat negara berkembang: Perspektif Antonio Gramsci. *Journal of Integratif International Relations*, 3(2).
- Hasriani. (2024). Implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Journal Of Social Sciences and Politics*, 10(2).
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ikhsan, R. (2023). Relasi kuasa pada pertambangan timah inkonvensional di kawasan Bendungan Pice Desa Lenggang. Universitas Bangka Belitung.
- Mukhtar. (2013). *Metode penelitian deskriptif kualitatif*. Rineka Cipta.
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi ruang publik dari civic centre menjadi business district (Belajar dari kasus kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tata Loka*, 16(3).
- Riadi, B. (2023). Dikunjungi Kabid Humas, Ketua AJI Pangkalpinang sampaikan apresiasi. *Tribatanews*. <https://tribranews.babel.polri.go.id/2023/03/21/dikunjungi-kabid-humas-ketua-aji-pangkalpinang-sampaikan-apresiasi/>
- Robi'ah, S. N. H. (2020). Media sosial sebagai ruang publik virtual bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *Jurnal Publique*, 1(1).
- Sara. (2022). Warung kopi sebagai sarana edukasi politik (Studi pada 1001 warung kopi Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Universitas Bangka Belitung.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Surokim. (2012). *Ekonomi politik media penyiaran lokal*. Interpena.